

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Penyunting:

M. A. Chozin.
Sumardjo
Roedhy Poerwanto
Ari Purbayanto
Ali Khomsan
Ahmad Fauzi
Toto Toharmat
Hardjanto
Kudang Boro Seminar



PEMBANGUNAN PERDESAAN
Dalam Rangka
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Prof. Dr Ir. M. A. Chozin, MAgr.
Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS.
Prof. Dr. Ir. H. Roedhy Poerwanto, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. H. Ari Purbayanto, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan
Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi. M.Sc
Prof. Dr. Ir. Toto Toharmat, MAgrSc.
Prof. Dr. Ir. Hardjanto, MS.
Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar

Editor Bahasa : Dr. M. Syukur
Desain Cover : Alita Wulan Dini
Lay Out : Sani Etyarsah

Copyright © 2010
Penerbit IPB Press
Kampus IPB Taman Kencana Bogor
Cetakan Pertama: Maret 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-230-8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xvii
I PENDAHULUAN	1
II KARAKTERISTIK WILAYAH PERDESAAN	
Karakteristik Perkembangan Wilayah Perdesaan.....	9
Transformasi Perencanaan Pembangunan Perdesaan dengan Beragam Tipologi.....	29
Desa dan Kesejahteraan Rakyat: Menegaskan Hak-hak Dasar Rakyat sebagai Platform Pembangunan	67
Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan dalam Memerangi Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan	79
III LANDASAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	
Landasan Pembangunan Perdesaan	99
Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	113
Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Pertanian Masa Depan	147
IV KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN	
Pembangunan Perdesaan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	173
Membangun Masyarakat Perdesaan yang Sehat Produktif.....	197
Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat Pesisir.....	221
Membangun Ekonomi Desa Melalui Pengembangan (Revitalisasi) Koperasi Unit Desa	241
Pengaruh Krisis Global dalam Pembangunan Perdesaan	253
Kesejajaran Usaha Tani Benih dengan Pemberdayaan Desa	269
Pentingnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Antar SKPD dalam Proses Implimentasi Program Agropolitan dan Agromerinepolitan di Sumatra Utara.....	275

V INOVASI DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

Prospek Pertanian Terpadu sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan di Indonesia: Kasus Rekayasa Spasial di Kabupaten Cianjur	291
Manajemen Lanskap dalam Pembangunan Pertanian menuju Harmonisasi Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan	313
Peran Pembangunan Kehutanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan.....	341
Model Pembangunan Perdesaan Nelayan di Wilayah Pesisir	385
Terobosan Teknologi dalam Produksi Udang untuk Memenangkan Persaingan antar Negara Produsen	405
Pembangunan Gizi dan Kesehatan Masyarakat	411
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan Peradaban yang Lebih Baik.....	433

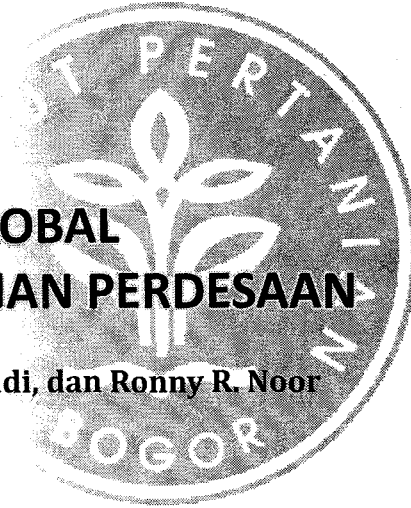
VI APLIKASI TEKNOLOGI UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pemanfaatan Lahan Tidur melalui Budidaya Tumbuhan Obat Sebagai Usaha untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitarnya	455
Teknologi Tepat Guna untuk Membangun Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	481
Sentuhan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional Melalui Diversifikasi Pangan	487
Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir melalui Inovasi Teknologi Pemisah Daging dan Tulang Ikan Ekonomis Rendah.....	503
Teknologi Tepat Guna Bagi Penyediaan Bioenergi di Perdesaan	515
Teknologi Tepat Guna untuk Desa Sebuah Otokritik Dari Pengalaman Sosiologi Perdesaan	521

TIM PENYUNTING	539
-----------------------------	------------

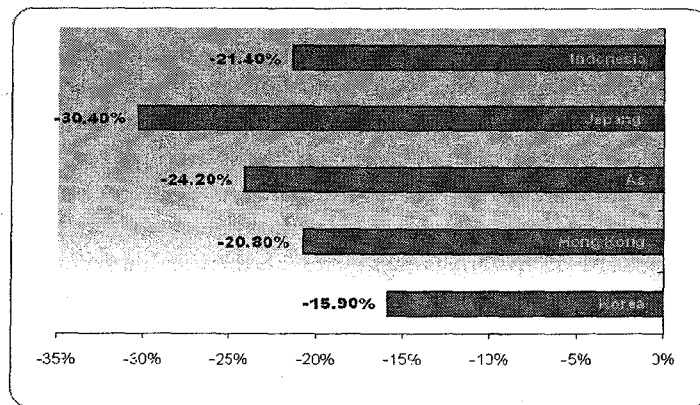
PENGARUH KRISIS GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

■ Eriyatno, Kadarwan Soewandi, dan Ronny R. Noor
■ Institut Pertanian Bogor



A. Pendahuluan

Krisis keuangan global yang merebak sejak Oktober 2008, indikasinya sudah dirasakan sejak tahun 2007 yang diawali dengan terjadinya kredit macet perumahan (*subprime mortgage*) dan terus bergulir tak terkendali serta berdampak luas ke berbagai bidang. Dalam rangka menahan laju krisis, pemerintah AS mengucurkan dana talangan sebesar US\$ 700 miliar namun upaya tersebut tidak mampu menyelamatkan perekonomian AS dari kehancuran. Kehancuran pun melanda bursa saham di kawasan Asia termasuk Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, begitu juga bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara, tak terkecuali di AS sendiri. Tak salah memang jika banyak pengamat menilai krisis keuangan tersebut kini telah menjadi krisis keuangan global (*global financial crisis*). Bahkan IMF telah memberi label krisis kali ini sebagai “*deep crisis*”, karena dampaknya diperkirakan telah mengenai hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Berikut adalah penurunan indeks saham negara-negara di dunia sebagai dampak dari hancurnya bursa saham *Wall Street* di USA.



Gambar 1. Penurunan Indeks Saham Oktober 2008

Indonesia menempati urutan keempat terburuk dunia dalam kehancuran pasar saham (pada tahun 2008 lalu, 51 persen jatuh), dan mengalami dampak negatif dari Krisis Keuangan 2008 di berbagai sektor lain. Sejumlah komoditas ekspor, harganya terpuruk. Misalnya produk industri tekstil akibat krisis ekonomi yang mendunia ini dan tidak terhindarkan. Menunjuk beberapa kasus, sebagai negara pengekspor komoditas pertanian Indonesia juga mulai dihadapkan pada melemahnya permintaan terhadap komoditas andalan seperti CPO, kakao, karet, teh, kopi, serta selanjutnya bergulir ke komoditas lain seperti udang dan ikan. Selain terjadi pelambatan kinerja ekspor, hal terakhir ini juga langsung mengancam ketersediaan peluang kerja dan berusaha di dalam negeri, sehingga menurunkan pendapatan masyarakat khususnya petani.

Amerika Serikat, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang mapan, ternyata tidak kuasa menghadang krisis moneter yang menimpanya. Apabila berkaca pada resesi ekonomi yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang juga dimulai dengan krisis moneter, maka dicatat Indonesia termasuk yang paling parah mengalami dampaknya dan lama melakukan penyembuhan. Apalagi pada saat itu, krisis tersebut berujung pada krisis politik. Mungkin krisis yang terjadi saat ini berbeda konteksnya dengan Krisis Moneter 1998 itu, tetapi hal yang perlu disadari adalah krisis saat ini masih dan akan terus mengancam dunia. Kita tidak boleh lengah karena diperkirakan dampak nyatanya akan semakin terasa dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan proses penanganan krisis itu perlu dipersiapkan sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan reaksi anti krisis. Para pengambil kebijakan menyatakan telah mencapai kesepakatan bersama untuk menempuh beberapa langkah untuk mengatasi krisis, seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Bahkan, ada beberapa langkah lain yang diambil dan dinyatakan tidak saja melibatkan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah dan juga pelaku dunia usaha. Berbagai langkah dinilai masih didasarkan pada metodologi dan kebijakan penanggulangan krisis ortodoks serta mengulang protokol penanganan krisis 1998 sebagaimana resep IMF. Padahal dengan resep seperti itu telah meningkatkan hutang Indonesia, yang apabila dihitung sejak krisis moneter 1998 hingga saat ini sudah mencapai 1.667 triliun.

Kondisi perekonomian yang ada sekarang ini dapat dipandang sebagai dampak dari penerapan bertahun-tahun atas konsep pertumbuhan ekonomi yang selalu diterapkan, dikejar dan dipercaya menjadi patokan untuk menggambarkan dan mengejar kondisi dari perekonomian masyarakat, dan

bahkan juga kesejahteraannya. Pembahasan atas indikator makro ekonomi yang terlalu fokus pada sektor finansial dan wilayah perkotaan seringkali dilakukan dengan melupakan pembahasan mengenai persoalan ekonomi riil utamanya di sektor pertanian dan di wilayah perdesaan.

B. Krisis Finansial Global

Saat ini dunia sedang diguncang oleh krisis finansial di tahun 2008 yang bermula di AS, dampaknya pun berimbas pada perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalami krisis moneter (tahun 1997/1998) yang parah, sehingga merusak pertumbuhan perekonomian nasional pada saat itu. Istilah krisis seolah sudah tak asing lagi di kehidupan ekonomi Indonesia, sebenarnya apakah definisi dari krisis itu sendiri? **Krisis** didefinisikan sebagai suatu kejadian mendadak yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan lembaga untuk menjalankan fungsinya. Pada umumnya penetapan parameter krisis di bisnis dikaitkan dengan manajemen risiko kuantitatif, meskipun sudah disadari bahwa dunia nyata belum tentu berperilaku secara acak dengan bentuk yang teratur. Teknik ekonometrik yang banyak dipraktikkan dalam madzhab neo-klasik mengkategorikan sifat acak tersebut sebagai perilaku yang dapat dianalisis, sedangkan apa yang terjadi di pasar uang ataupun pasar modal adalah ketidakteraturan yang disebabkan proses umpan balik yang positif. Asumsi yang diakui oleh paham neo-klasik yaitu berlakunya prasyarat statistik tentang teori probabilitas ternyata terbukti tidak sah di praktek pasar finansial. Padahal bila memakai alat analisis yang salah berdasar teori yang salah, maka jawabannya pun pasti salah.

Krisis Finansial adalah peristiwa yang meledak akibat konflik antara kekuatan yang relatif bertentangan kepentingan yang ditandai dengan keruntuhan dalam bidang keuangan dan perbankan, yang bermula dari kegagalan satu-dua lembaga keuangan. Gejala kebangkrutan tidak terbatas pada lingkungan keuangan dan perbankan, menjalar ke dunia usaha secara umum yang mengawali keruntuhan sistem ekonomi. Gejala awal krisis adalah tingginya beban hutang pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana pola hidup dan tingkat konsumsinya disandarkan pada kredit dan rupa-rupa pinjaman lainnya. Gejala tersebut diperparah dengan adanya akuisisi bisnis yang lazimnya dibiayai pinjaman besar-besaran dari perbankan dan didorong oleh spekulasi yang bertualang di pasar-pasar modal serta dipicu oleh nafsu serakah (*greed*) yang tidak kenal batas.

Pada tanggal 8 Oktober 2008 terjadi kepanikan di pasar modal USA, dalam dua hari *Wall Street* kehilangan 65.000 triliun rupiah akibat runtuhnya harga saham (S&P BMI-Global Index, 2008). Sebenarnya malapetaka di

Wall Street sudah diindikasikan sejak 2005 dimana telah terjadi krisis kredit perumahan yang kurang layak (*subprime mortgage*). Pada waktu itu terhitung 14.000 triliun rupiah menguap, dimana salah satu bank ternama Lehman Brother merugi 600 triliun rupiah. Namun, keterbatasan pengetahuan akan gejala krisis tersebut, membuat Bank Central USA (the FED) pada April 2008 menyatakan sudah redanya gejala tersebut.

Menurut Wen Jiabao, Perdana Menteri China pada pertemuan WEF di Davos bulan Februari 2009, telah terjadi kegagalan supervisi dan regulasi di sektor keuangan untuk mendampingi percepatan inovasi finansial yang ekspansif dan beresiko tinggi serta meluas. Akibatnya pada saat meletusnya Krisis Finansial Global di awal Oktober 2008, banyak korban berjatuhan. Salah satunya, Lehman dinyatakan bangkrut pada tanggal 17 Oktober 2008. Nilai sahamnya yang pada tahun 2007 sebesar \$ 67,73 anjlok menjadi \$ 0,22. Pemerintah USA akhirnya harus merogoh kocek sebesar 7.000 triliun rupiah untuk mencegah keruntuhan institusi finansialnya, termasuk perusahaan asuransi terbesar AIG disuntik dana 850 triliun rupiah yang sampai Juli 2009 tetap bermasalah.

Ternyata kekisruhan di USA dengan cepat menular ke seluruh dunia, dikarenakan globalisasi finansial membuat keterkaitan yang rumit antar lembaga keuangan berbagai negara. Seperti efek domino, negara-negara di Eropa, Jepang, Australia dan sebagainya kena dampak langsung karena investasi pada CDO (*Collateral Debt Obligation*) serta penyertaan modal pada institusi perbankan di USA. Berbagai upaya dari rekapitalisasi (*bail out*) perbankan sampai ke stimulus fiskal dilakukan oleh pemerintah negaranya agar laju penurunan spiraltik dapat dicegah.

Kerusakan lembaga finansial dunia berlanjut merambah ke berbagai sektor. Dampak sosial mulai bermunculan, dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan macetnya produksi di sektor riil dan melemahnya permintaan atas produk akibat daya beli yang menurun serta meningkatnya kredit bermasalah. Titik kulminasi dari kekacauan global tersebut adalah menurunnya perdagangan antar negara yang dikarenakan macetnya kredit (*credit crunch*) untuk menunjang perdagangan impor-ekspor. Akibatnya, global krisis sudah bermutasi menjadi krisis finansial dan perdagangan. Negara yang berorientasi ekspor seperti Singapura sudah tumbuh negatif, dan di Indonesia pun berbagai eksportir hasil ikan, agroindustri dan kerajinan sudah mulai turun kapasitasnya.

Pakar manajemen berkaliber dunia, Drucker (2009), menyebutkan bahwa krisis ini terjadi akibat gejala ketidakseimbangan antara sektor moneter

dan sektor riil, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya kegiatan bisnis spekulatif, sehingga dunia terjangkit penyakit yang bernama ekonomi balon (*bubble economy*). Dijelaskannya, perkembangan “kredit derivatif”, sebagai instrumen keuangan merupakan pemicu kerusakan dan krisis ekonomi global. Merujuk data Morgan Stanley, nilai kredit derivatif pada tahun 1998 yang hanya Rp 500 triliun, namun pada Desember 2002 ditaksir sudah mencapai Rp 24.000 triliun, suatu kenaikan yang luar biasa, yakni sebesar 4700 kali lipat, didalam empat tahun. Transaksi derivatif ini adalah transaksi “maya” (semu) yang dikaitkan dengan aktiva keuangan. Demikian pula transaksi *future trading* merupakan spekulasi (*hypothesis predictive price*) tentang kejadian di masa yang akan datang, juga sangat laris dipraktekkan dalam bisnis modern. Akhirnya, perekonomian dunia digelembungkan oleh transaksi maya tersebut dilakukan oleh para *super rich* di beberapa kota dunia, seperti London (27 %), Tokyo, Hongkong, Singapura (25 %) dan Chicago-New York (17 %). Transaksi maya ini, mencapai 99 persen dibanding transaksi riil.

Kesimpulan dari proses krisis keuangan global 2008 ini, bahwa kapitalisme modern saat ini rapuh karena dibangun dengan *monetary based economy (virtual economic)* bukan *real based economy*. Artinya, sektor ekonomi banyak dikembangkan berdasarkan transaksi maya daripada di sektor riil. Rantai ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dalam investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan dihadapi seandainya hal-hal tersebut masih terus dilakukan adalah runtuhnya sistem keuangan.

C. Krisis Manajemen

Dalam konteks krisis ekonomi terbaru ini, paling tidak sejumlah permasalahan mendasar dari perekonomian akibat akumulasi kebijakan ekonomi yang bernuansa liberal selama ini berupa krisis ketenagakerjaan yang makin akut. Proses tersebut mendorong kemiskinan struktural yang parah khususnya di **perdesaan** yang akhirnya mendorong ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar daerah, konsentrasi kepemilikan aset produktif di tangan orang amat kaya (*super rich*), beban utang luar negeri berkelanjutan dan investasi pasar uang nasional didominasi pemodal asing. Jumlah rekening (jumlah orang) berbanding terbalik dengan jumlah simpanan, ternyata hanya 0,03 persen penabung yang mempunyai simpanan di atas 5 miliar dan sebanyak 97,99 persen penabung mempunyai simpanan antara 0-100 juta. Ini adalah potret kesenjangan sosial atau rendahnya pemerataan pendapatan.

Kini belum terlambat untuk melakukan perubahan orientasi pengembangan ekonomi dengan pemikiran dan cara-cara yang baru. Oleh karena itu, semua pihak, sesuai dengan peran masing-masing dapat melakukan aksi dengan berbagai kegiatan bisnis di sektor riil. Kegiatan sektor riil yang bisa dikembangkan cukup banyak antara lain, sektor agribisnis, mini market, konveksi, pabrik segala kebutuhan hidup keseharian, seperti pabrik susu, pabrik sabun, shampo dan ratusan jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Dalam mengembangkan sektor riil ini, diperlukan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, seperti bank sentral, para akademisi, pengusaha dan masyarakat.

Apabila di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, penyelesaian krisis adalah dengan membuka peluang bekerja secara besar-besaran; namun untuk negara kita, dengan arah yang sama tetapi dengan mengutamakan penguatan UMK. Di dalam konteks ini, lembaga keuangan, seyogianya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, terutama agribisnis/agroindustri dan UMK yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional, dan bersifat universal. Di pihak lain, proses itu perlu sekaligus digunakan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan pola pengelolaan potensi sumberdaya dan ekonomi lokal di dalam suatu sistem yang menggerakkan dan memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Penetapan agribisnis/agroindustri dan UMK tersebut juga perlu dijadikan dasar pembangunan secara struktural sebagai satu media untuk mengembangkan sistem pendanaan yang tidak hanya akan dapat memacu perbaikan perekonomian, tetapi dapat mendukung kondisi sosial, politik, dan moralitas kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik.

Pada bulan Juli 2009, telah terjadi angin segar dengan indikator makro ekonomi yang mulai membaik. Akan tetapi, harus tetap diwaspadai dampak sampingan pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan, dimana usaha mikro dan kecil menjadi tulang punggung untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Krisis global yang terjadi sekarang ini membawa implikasi serius pada pelambatan ekonomi yang secara signifikan telah mengurangi bahkan menghilangkan surplus ekonomi bagi rumah tangga maupun industri secara umum. Pada kasus Indonesia, kondisi ini juga diperparah dengan adanya jatuh tempo untuk pembayaran hutang luar negeri baik bagi hutang pemerintah maupun sektor swasta. Perbankan masih enggan mengucurkan

kredit usaha sehingga menyebabkan langkanya sumber pendanaan bagi investasi perekonomian masyarakat. Kondisi ini berpadu dengan faktor-faktor yang melingkupi kondisi pertanian secara umum (karakteristik usaha serta perubahan kondisi alam) akan dapat memarjinalkan wilayah perdesaan. Intervensi yang proporsional dari pemerintah diperlukan untuk mencegah kondisi krisis ini terjadi. Tuntutan intervensi ini dilandasi oleh adanya kepentingan terhadap wilayah perdesaan bagi kepentingan nasional. Intervensi ini dalam jangka pendek menjadi katup sosial bagi sektor pertanian secara luas, yang bersifat *emergency respons* terhadap dampak krisis global. Intervensi ini diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Stiglitz (2005) sebab salah satu sumber penting terjadinya kegagalan pengendalian krisis ekonomi sampai terjadi keterpurukan adalah hilangnya visi mengenai peran pemerintah yang berimbang.

Intervensi ini diperlukan secara cepat dalam aspek yang menyeluruh untuk perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian di perdesaan. Hal ini dilakukan karena pertanian terutama di perikanan dan peternakan di Indonesia menghadapi kendala informasi pasar yang sangat asimetris baik pada pasar *input* atau *output*. Pada pasar *input*, keterbatasan kapital serta kondisi efisiensi usaha yang tidak sama dengan sektor industri *input* produksi, menyebabkan petani sebagai *price taker*. Demikian pula pada pasar *output* dengan karakteristik *highly perishable* serta keterbatasan kapital untuk operasional serta kehidupan sehari-hari, menyebabkan petani terjebak pada praktik ijon baik langsung maupun tidak langsung. Tidak adanya kekuatan penyangga (*buffer power*) baik formal maupun nonformal yang dapat meningkatkan *positioning* petani pada pasar *input* maupun *output*, menjadikan petani sangat rentan terhadap turbulensi ekonomi. Bahkan ketika pada konsep agribisnis, kondisi ini bisa tidak terjamin karena posisi tawar *on-farm* selalu lebih rendah dari *backward* maupun *forward linkage*-nya.

Oleh karena itu, intervensi diperlukan untuk menyiapkan mekanisme sistem penyangga (*buffer mechanism*) bagi sektor pertanian secara keseluruhan bukan hanya pada kekuatan untuk penyediaan modal. Kekuatan kapital yang tersedia dengan baik bila tidak didukung oleh sistem yang kuat tidak bisa bekerja dengan efektif, yang justru dapat mendorong petani pada jebakan finansial (*financial trap*) berupa utang karena pengelolaan dan efektivitas pemanfaatan modal yang rendah. Hal ini sering terjadi pada asistensi modal dalam bentuk kredit (baik lunak maupun komersial) yang tidak sejalan dengan perkembangan skala usaha. Distribusi asistensi modal yang tidak rasional juga dapat mendorong penyalahgunaan sumber pembiayaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kasus KUT.

Intervensi yang diperlukan untuk mengembangkan mekanisme penyangga pertanian harus dilakukan secara sistemik dan menyeluruh meliputi rekayasa kelembagaan, rekayasa teknologi, inovasi pasar serta kebijakan-kebijakan yang mendukung aksesibilitas petani pada input produksi agar usaha tani bersifat efisien dan mandiri. Sementara sistem penyangga juga diperlukan untuk mengembangkan kesadaran kolektif petani untuk bersedia dan mampu saling menolong pada kondisi krisis dalam membangun **resiliensi kolektif**. Kondisi ini sangat diperlukan untuk menyiapkan wilayah perdesaan dalam menghadapi dampak dari krisis global yang diperkirakan akan sangat intens dirasakan di Indonesia mulai pertengahan tahun ini. Kegagalan dalam menyiapkan petani untuk menghadapi dampak krisis global tidak hanya membahayakan bagi petani, tapi bagi ketahanan nasional dan NKRI

Untuk dapat membangun sistem penyangga dan perdesaan pertanian yang fungsional, maka harus dilakukan :

1. Pemetaan faktor dan parameter yang dihadapi sejalan dengan eskalasi dampak krisis pada sektor pertanian di perdesaan. Hal ini dapat ditelusuri dari mulai keterbatasan modal usaha, peningkatan harga *input*, hilangnya daya beli masyarakat dan penurunan efisiensi usaha mikro.
2. Pemetaan titik-titik krusial atas arus *input* dan *output* dan fungsi-fungsi kelembagaan lokal dalam hal jejaring antar petani, transfer inovasi dan pengembangan modal sosial petani.
3. Identifikasi inovasi-inovasi rekayasa kelembagaan, teknologi dan pasar yang telah secara nyata efektif dan praktis bagi pengembangan usaha tani.
4. Identifikasi alternatif mekanisme bantuan kelompok kerja anti-krisis yang multidisiplin berdasar kebutuhan daerah.

Di sinilah pentingnya perumusan kebijakan publik yang pro-rakyat, agar kegagalan pasar yang terjadi tidak digantikan oleh kegagalan pemerintah yang menurut Stiglitz (2000) disebabkan oleh: (1) keterbatasan informasi, (2) respon yang keliru terhadap pengendalian atas pasar dunia usaha, (3) kontrol birokrasi dan (4) penekanan oleh kekuatan-kekuatan politik (*vested interest*).

Tingkat prioritas intervensi dibangun atas kriteria manajemen krisis dimana diharapkan keseluruhan taktis operasionalisasinya tetap menuju kearah **normalisasi** situasi dan kondisi perekonomian domestik, seraya terus melakukan pencegahan atas terjadinya *chaos*.

Pembinaan sektor riil di perdesaan melalui pengembangan UMK perlu diawali dengan sistem penggalan nilai etik dan moral kelembagaan ekonomi untuk kemajuan suatu masyarakat dimana prosesnya harus sejalan dengan pengembangan landasan etik dan moral bagi usahawan dan penyelenggara pemerintahan. Strategi pengembangan UMK perdesaan tidak saja menjadikan pelakunya sebagai wirausaha, tetapi makhluk ekonomi yang beretika dan menjunjung tinggi norma mencari kebaikan untuk semua orang. Pada akhirnya, sistem ekonomi domestik berkembang dengan memberi tempat pada berbagai bangun usaha sehat dan modern baik skala mikro, kecil, menengah dan bermitra dengan usaha besar secara berkeadilan.

D. Jaring Pengaman Sektor Pertanian dan Perdesaan

Bahwa **Pancasila** mengamanatkan terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimana sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian yang berada di kawasan perdesaan dan lebih dari 90 persen dalam skala usaha mikro dan kecil. Bahwa krisis keuangan dan perdagangan global 2008/2009 dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia dengan meningkatnya pengangguran, naiknya jumlah rakyat miskin dan melemahnya ketahanan pangan, sehingga perlu ditetapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka stabilitas nasional. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah menetapkan legalitas formal tentang Sistem Jaring Pengaman Sektor Pertanian di Perdesaan

Beberapa definisi untuk perumusan kebijakan publik yang digunakan dalam Sistem Jaring Pengaman Sektor Pertanian di Perdesaan adalah:

1. **Jaring Pengaman Sistem Pertanian di Perdesaan** adalah suatu mekanisme penyelamatan dan pemulihan dampak krisis keuangan dan perdagangan global terhadap sektor pertanian, pangan dan wilayah perdesaan
2. **Krisis** adalah suatu kondisi dimana sistem perbankan yang sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi intermediasi dan peran pembiayaan untuk produksi usaha tani, nelayan, agroindustri dan perdagangan komoditas pertanian dan perikanan baik pasar dalam negeri maupun ekspor
3. **Berdampak Sistemik** adalah suatu kondisi turbulensi sosial yang ditimbulkan oleh gejolak pasar komoditas pertanian yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan rawan pangan, pemutusan hubungan kerja yang meluas serta kerusakan pranata sosial di wilayah perdesaan

4. **Sektor Pertanian** adalah keseluruhan mata rantai sistem pengelolaan sumberdaya alam yang mencakup komoditas tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan nonkayu; yang mencakup elemen sumberdaya manusia, alam dan teknologi, dan jasa lingkungan.
5. **Usaha Mikro dan Kecil Sektor Pertanian** mencakup usaha tani/nelayan, pasca panen, pengolahan hasil dan perniagaan, yang batasannya diatur dalam UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. **Perdesaan** atau Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Kawasan Perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Program-program berbantuan tersebut dapat bersumber dari dana stimulus fiskal, yang diarahkan pada Usaha Mikro Kecil sektor pertanian di wilayah perdesaan. Secara operasional, program tersebut dapat berbentuk:

1. **Bantuan Pendampingan** di wilayah rawan krisis yang selanjutnya disebut BPP adalah hibah untuk kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program penyelamatan dan pemulihan dampak krisis
2. **Fasilitas Pembiayaan Darurat** adalah fasilitas pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk stimulus fiskal kepada sektor pertanian yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik
3. **Bantuan Langsung Masyarakat** yang selanjutnya disebut BLM adalah hibah dari pemerintah dalam bentuk bantuan fisik seperti beras dalam mengatasi rawan pangan dan gizi, serta dalam bentuk upah kerja untuk membiayai kegiatan seperti padat karya untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian termasuk irigasi dan jalan desa
4. **Dana Bergulir** adalah pinjaman jangka panjang dari pemerintah untuk perkuatan permodalan dan investasi dari usaha mikro dan kecil secara bergulir melalui lembaga keuangan mikro setempat.

Jaring Pengaman Sistem Pertanian di Perdesaan (JPSPP) bertujuan untuk membangun resiliensi dan memelihara stabilitas sistem pertanian, masyarakat dan desa melalui upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) dari krisis. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Pertanian di Perdesaan meliputi Penyelamatan dan Pemulihan dampak krisis serta merupakan program jangka pendek dalam masa turbulensi sosial yang dapat mengarah pada disintegrasi negara.

JPSPP merupakan program-program berbantuan dengan dana APBN/APBD yang dilaksanakan dan dikelola berbagai departemen/instansi pemerintah pusat dan daerah. Dalam meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan antarinstansi dan antar daerah tersebut, dibentuk **Komite Normalisasi Sistem Pertanian dan Perdesaan (KNSPP)** di tingkat pusat dan **Tim Koordinasi Pengelolaan Program-Program (TKPP)-JPSPP** di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Unsur penunjang dalam pelaksanaan JPSPP yang melekat pada tim koordinasi adalah **Pusat Data dan Informasi JPSPP** yang berfungsi untuk mengelola komunikasi publik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, dan **Unit Pengaduan Masyarakat JPSPP** yang berfungsi untuk menampung, meneliti dan menyampaikan tindak korektif atas pengaduan yang berasal dari masyarakat atau media masa. Untuk kepentingan pemantauan pelaksanaan JPSPP, lembaga-lembaga nonpemerintah dapat membentuk **Tim Monitoring Independen** sebagai upaya meningkatkan transparansi program di daerah.

Tindak lanjut dari perumusan JPSPP tersebut dapat ditata dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang setaraf dengan Undang-undang. Dengan demikian payung hukum yang diperlukan untuk tindakan darurat semasa krisis terjadi dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan normalisasi keadaan dan atau pencegahan terhadap kemungkinan *chaos*.

Daftar Pustaka

- Abdul Salam. 2007. *Sustainabilitas Koperasi Simpan Pinjam dalam Rangka Peningkatan Peran Keuangan Mikro bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Disertasi, UGM-Yogyakarta.
- Acevedo, J.C. 2007. *Crisis Management and Emergency Response in Banking Industry*. BADM 395, unpublished.
- Alligood, K.T et.al. 1996. *Chaos: an Introduction to Dynamical System*. Springer-Verlag Pub., NY.
- Alirahman dan Erman Munzir. 2008. *Mengantisipasi Dampak Lanjutan Krisis Keuangan Amerika Serikat*. *Jurnal Negarawan*, (1), 49:77..
- Ananta, Aris. 1995. *Rangkuman: Antara Jumlah dan Mutu Penduduk dalam Transisi Demografi, Pendidikan dan Kesenjangan di Indonesia*. BKKBN, Jakarta.
- ASEM. 1999. *States and Markets*. Copenhagen – Conference.
- Bappenas dan Depdagri. 2002. *Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2008. *Strategi Meningkatkan Konsumsi Hasil Perikanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta.
- Bernhard, W.T et al. 2003. *The Political Economy of Monetary Institutions*. The MIT Press, Cambridge.
- Business Innovation Center of Indonesia*. 2003. *Lembaga Keuangan Mikro*. IPB-Press, Bogor
- B.S. Kusmuljono. 2009. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha: Hybrid Microfinancing*. IPB Press, Bogor.
- BPS. 2006. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi 2005 dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS 2005)*. BPS, Jakarta.
- Cooper, G. 2008. *The Origin of Financial Crisis*. Harriman House ltd., Great Britain.
- Cooper, D.L. and P.S. Schindler. 2006. *Business Research*. Mc Graw Hill Pub., UK
- Departemen Pertanian. 1991. *Informasi Peluang Investasi Agribisnis Pedesaan di Indonesia*. Ditjen Pertanian, Jakarta.
- Devancy, R.L. 1986. *An Introduction the Chaotic Dynamical System*. Dept of Mathematic, Boston University.

- Dhar, V. and R. Seven Methods for Transforming Corporate Data into Business Intelligence. Prentice Hall Inc., NY
- Dubois, M. 1992. Chaotic or Random? Limits of Characterization. Frontiers Pub., France.
- Dyck, R.G. 2008. Democracy and its Imperative for a New Social Contract. Virginia Tech. Univ, USA.
- Eriyatno dan Fajar Sofyar. 2007. Riset Kebijakan. IPB-Press. Bogor.
- Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem : Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. IPB Press, Bogor.
- Eriyatno. 1996. Sistem Ekonomi Kerakyatan, Suatu Telaah dari Ilmu Sistem. Majalah Perencanaan Pembangunan No. 4, 33-39.
- Fanning, C. and D.O. Mahony. 1998. The General Theory of Profit Equilibrium. Mc Millan Press, Ltd. London.
- Fakin, D. H and H.S. Rosen. 2004. Public Policy and the Economics of Entrepreneurship. The MIT Press, Cambridge.
- FAO. 2007. The Status of World Fisheries and Aquaculture 2006. Rome.
- Giddens, A. 1998. The Third Way. Polity Press. Cambridge., UK.
- Gleick, J. 1987. Chaos, Making a New Science. Viking Penguin Inc., NY.
- Gibney, M. J., Voster, H. H. dan F. J. Kok. 2002. Introduction to Human Nutrition. Nutrition Society. Blackwell Science.
- Ginanjari Kartasmita. 1995. Pemberdayaan Masyarakat. Universitas Brawijaya, Malang.
- Hariyadi, P. 2007. Pangan dan Daya Saing Bangsa. SEAFASST Center, LPPM IPB, Bogor.
- Hariyadi, P. 2008. Otoritas Nasional Keamanan Pangan. SNI Valuasi vol 2, 7-9.
- Hariyadi, P. 2008. Beban Ganda: Permasalahan Pangan di Indonesia. Majalah Pangan, 51 (17), 17-27.
- Hariyadi, P. 2009. Menuju Kemandirian Pangan: Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. SEAFASST Center, LPPM IPB dan Departemen Keuangan RI.
- Helleman, R. L. 1986. On mechanism for the Onsets of Large Scale Chaos in Conservative and Dissipative Systems. John Wiley Pub., NY.]

- Herman Haeruman dan Eriyatno. 2001. Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Yayasan Mitra Pembangunan desa-kota dan BIC-Indonesia, Jakarta.
- Huntsberger, D.V and P. Billingsley. 1973. Elements of Statistical Inference. Bilyn and Inc., USA
- Islam, T. 2007. Microcredit and Poverty Alleviation. Ashgate Pub., England.
- Jackson, M. 2000. System Management. Mc. Graw Hill Pub., NY
- Kadarwan, S. 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Perikanan dan Kelautan. Dewan Ketahanan Pangan-Deptan RI.
- Kadarwan, S. dan L. Adrianto. 2006. Tiga Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Dewan Maritim Indonesia, Jakarta.
- Kadarwan, S. 2007. Persepektif Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan. BPS DMKP, Jakarta
- Kamal, Y.M. 1995. The Principle of the Islamic Economic System. Islamic Pub, Egypt.
- Kiviat, B. 2009. Sunk by Securitization=Building Loans and Selling them to Investors proved Disastrous. Time, March 2, 42-43.
- Khomsan, Ali. 2008. Kontribusi Konsumsi Hasil Perikanan pada Pemenuhan Kebutuhan dan Kecukupan Gizi. Diskusi Strategi Meningkatkan Konsumsi Hasil Perikanan, Bappenas.
- Komara Djaya. 1997. Ekonomi Rakyat. Bahan Diskusi Intern Bappenas (Tidak Dipublikasikan).
- Kolopaking, L.M. 2005. Manajemen Pembangunan Desa dalam Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis Komunitas. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA-IPB.
- Kolopaking, L.M. 2006. Proses Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Lokal. PSP3-IPB dan UNDP.
- Kusmuljono; B.S. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha: Sebuah Konsep Baru Tentang *Hybrid Microfinancing*. IPB-Press, Bogor.
- Kwik Kian Gie. 2002. Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian (Tidak dipublikasikan).
- Lehmann, J.P. 2008. If the Global Financial Crisis Becomes a Global Trade Crisis. [Http://www.ima.ch](http://www.ima.ch).
- Lipton, A. 2008. Theory and Practice of Credit Risk Modelling. Risk Book Pub., London.

- Lunati, M.T. 2000. *Ethical Issues in Economics. From Altruism to Cooperation to Equity*. Bolton Institute, USA
- Mahendra Siregar. 2009. *Perkembangan Krisis Ekonomi Global dan Pengaruhnya kepada Indonesia*. Makalah, Bakrie School of Management-Jakarta.
- Moss, N.J. 1978. *Economic Fluctuations: A Framework for Analysis and Policy Design*. IIEE-Trans SMC (8), 437:449.
- Mosekilde, E. 1993. *Chaos and Hyperchaos in an Experimental Economic System*. Technical Univ, Denmark.
- Monke, E.A adn S.R. Pearson. 1989. *The Policy Matrix Analysis for Agricultural Development*. Cornell Univ. Press, Ithaca.
- Mubyarto. 2003. *Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 18(3), 218-224.
- Mubyarto, Lukman Sutrisno dan M. Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.
- Mubyarto. 1996. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Maria, Jakarta.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta
- Muslimin Nasution. 2002. *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*. IPB Press-Bogor.
- Murray, N. 2008. *Simple Wealth, Inevitable Wealth*. The Risk Money co, Inc. USA.
- Noor, R.R. 2007. *Redefinisi Politik Pembangunan Peternakan*. *Argo Observer* 13 (11):28-29
- Obama, B. 2006. *The Audicity of Hope*. Crown Pub., NY.
- Pakpahan, A. dkk. 2005. *Membangun Pertanian Indonesia*. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor.
- Pettifor, A. 2003. *Real World Economic Outlook-the Legacy of globalization: debt and deflation*. Jubilee Research at the New Economic Foundation.
- Pierce, R. 2008. *Research Methods in Politics*. Sage Pub., NY.
- Regmi. A, M.S. Deepak, J.L. Seale Jr., J. Bernstein. 2008. *Cross-Country Analysis of Food Consumption Patterns in Changing Structure of Global Food Consumption and Trade*. Economic Research Service/ USDA.

- Pearson, CM. dan I. Mitroff. 1993. From Crisis Prone to Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management. *The Executive*, vol 7, 48-60.
- Prijono Tjiptoheriyanto. 1996. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. *Majalah Perencanaan Pembangunan* No. 4, 12-24.
- Scumacher, E.F. 1993. *Small is Beautiful*. Random House, London.
- Stiglitz, J.E. 2000. *Economics of the Public Sector*. WW Norton Co Pub., NY.
- Stiglitz, Yoseph E. 2005. Dekade Keserakahan, Era awal 90 an dan Awal Mulai Petaka Ekonomi Dunia. *Margin Kiri*, Jakarta.(terjemahan).
- Spratt, J.C. 2003. *Chaos and Time Series Analysis*. Oxford Univ. Press-UK.
- Sulaeman, Ahmad. 2008. Strategi Meningkatkan Konsumsi Hasil Perikanan Indonesia. Makalah pada Panel Diskusi Strategi Meningkatkan Konsumsi Hasil Perikanan, Bappenas. Jakarta.
- Susilo Bambang Yudhoyono. 2008. Antisipasi Dampak Krisis Keuangan Global. *Jurnal Negarawan* (1),1:22.
- Sri Edi Swasono. 2005. *Daulat Rakyat versus Daulat Pasar*. Penerbit PUSTP-UGM, Yogyakarta.
- Soros, G. 2009. *The Credit Crisis of 2008 and What It Means*. Persens Book group. USA.
- Thompson, D. 2008. *Counter-Knowledge*. Atlantic Book Pub. London.
- Turban, E and J.E. Aronson. 2005. *Decision Support System and Intelligent System*. Prentice Hall Pub., USA.
- UNICEF, 1998: *The State of the World's Children 1998*. Oxford Univ. Press
- Uzawa, H. 2009. *Economic Theory and Global Warming*. Cambridge Univ. Press., USA
- World Bank. 2003. *Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms*. Report No. 25330-IND.
- Wyat, S. and C. Ryan. 2009. Instability Fear Drives Strategy. *The Australian Financial Review*. March 6, 19.
- Ye. 1999. *Historical Consumption and Future Demand for Fish and Fishery Products : Exploratory Calculation for The Years 2015/ 2030*.
- Zandy, M. 2008. *Financial School*. Financial Time Press, ltd.